

**MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH**

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Menimbang:	Menimbang:	
	a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah;	Pasal 232 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ketentuan lebihlanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
	b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;		
	c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru;		
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah;		
2.	Mengingat:	Mengingat:	
	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
	2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	UU Nomor 23 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU Nomor 32 Tahun 2004

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
3.	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
	Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.	Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH.	
	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
4.	Pasal 1	Pasal 1	
		1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	
	7. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.	2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	
	8. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.	3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.	
	1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	
	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
	6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
		9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.	
		10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.	
		11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.	
		12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	
		13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.	
		14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.	
		15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.	
	10. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.	16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.	
		17. Hari adalah hari kerja.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.		
	11. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota.		
	12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.		
	13. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan sekretaris kabupaten/kota.		
	14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.		
5.		Pasal 2	
		Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.	Menetapkan asas pembentukan peraturan Daerah
	BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BAB II PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH	
		Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
6.	Pasal 2	Pasal 3	
	<p>(1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini.</p> <p>(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.</p> <p>(3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.</p>	<p>(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(4) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda.</p> <p>(5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.</p> <p>(7) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan.</p> <p>(8) Dalam hal kepala Daerah mengundang Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Menetapkan keberlakuan Perda terkait pembentukan dan susunan Perangkat Daerah</p>

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
7.		Pasal 4	
		Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.	
		Bagian Kedua Jenis Perangkat Daerah	
8.		Pasal 5	
		<p>(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sekretariat Daerah;</li> <li>b. sekretariat DPRD;</li> <li>c. inspektorat;</li> <li>d. dinas; dan</li> <li>e. badan.</li> </ul> <p>(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sekretariat Daerah;</li> <li>b. sekretariat DPRD;</li> <li>c. inspektorat;</li> <li>d. dinas;</li> <li>e. badan; dan</li> <li>f. kecamatan.</li> </ul>	Menetapkan jenis perangkat daerah provinsi dan kabupaten atau kota
		Bagian Ketiga Kriteria Tipologi Perangkat Daerah	
9.		Pasal 6	
		<p>(1) Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan</li> <li>b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).</li> </ul> <p>(2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:</p>	Menetapkan kriteria Tipologi Perangkat Daerah

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		a. jumlah penduduk; b. luas wilayah; dan c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.	
	BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI	BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	
	Bagian Pertama Sekretariat Daerah	Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi	
		Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi	
10.	Pasal 3	Pasal 7	
	(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf. (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;</li> <li>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;</li> <li>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;</li> <li>d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan</li> </ol>	(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf. (2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. (3) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. (4) Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;</li> </ol>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.</p> <p>(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.</p>	<p>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;</p> <p>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;</p> <p>d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.</p>	
11.		Pasal 8	
		<p>(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. sekretariat Daerah provinsi tipe A untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;</p> <p>b. sekretariat Daerah provinsi tipe B untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan</p> <p>c. sekretariat Daerah provinsi tipe C untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.</p>	Menetapkan tipe Sekretariat Daerah Provinsi
	Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Paragraf 2 Sekretariat DPRD Provinsi	
12.	Pasal 4	Pasal 9	
	<p>(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.</p> <p>(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>(1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.</p> <p>(2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;</li> <li>b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;</li> <li>c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan</li> <li>d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.</li> </ol> <p>(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.</p> <p>(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.</p>	<p>provinsi.</p> <p>(3) Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.</p> <p>(4) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(5) Sekretariat DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;</li> <li>b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;</li> <li>c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan</li> <li>d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.</li> </ol>	
13.		Pasal 10	
		<p>(1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekretariat DPRD provinsi tipe A untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;</li> <li>b. sekretariat DPRD provinsi tipe B untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan</li> <li>c. sekretariat DPRD provinsi tipe C untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.</li> </ol>	Menetapkan tipe Sekretariat DPRD Provinsi

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	Bagian Ketiga Inspektorat	Paragraf 3 Inspektorat Daerah Provinsi	
14.	Pasal 5	Pasal 11	
	<p>(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan program pengawasan;</li> <li>b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan</li> <li>c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.</li> </ol> <p>(4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.</p> <p>(5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.</p>	<p>(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.</p> <p>(3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>(5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;</li> <li>b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</li> <li>c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;</li> <li>d. penyusunan laporan hasil pengawasan;</li> <li>e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan</li> <li>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	
15.		Pasal 12	
		<p>(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Menetapkan tipe Inspektorat Daerah Provinsi

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		terdiri atas: a. inspektorat Daerah provinsi tipe A untuk mewedahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang besar; b. inspektorat Daerah provinsi tipe B untuk mewedahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan c. inspektorat Daerah provinsi tipe C untuk mewedahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.	
	Bagian Keempat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
16.	Pasal 6		
	(1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. (3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan. (5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.		Tidak lagi mengatur mengenai BPDP dalam pasal tersendiri

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	Bagian Kelima Dinas Daerah	Paragraf 4 Dinas Daerah Provinsi	
17.	Pasal 7	Pasal 13	
	<p>(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.</p> <p>(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol> <p>(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.</p> <p>(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.</p> <p>(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.</p>	<p>(1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>(2) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.</p> <p>(3) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.</p> <p>(4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	
18.		Pasal 14	
		<p>(1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dinas Daerah provinsi tipe A untuk memudahhi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;</li> </ol>	Menetapkan tipe Dinas Daerah Provinsi

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. dinas Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan</li> <li>c. dinas Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.</li> </ul>	
19.		Pasal 15	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</li> <li>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan</li> <li>b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.</li> </ul> </li> <li>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</li> <li>e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan</li> <li>f. sosial.</li> </ul> </li> <li>(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tenaga kerja;</li> <li>b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>c. pangan;</li> <li>d. pertanahan;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan secara rinci kategori urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan</li> <li>b. Masing-masing urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk Dinas</li> </ul>

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. lingkungan hidup;</li> <li>f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>i. perhubungan;</li> <li>j. komunikasi dan informatika;</li> <li>k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;</li> <li>l. penanaman modal;</li> <li>m. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>n. statistik;</li> <li>o. persandian;</li> <li>p. kebudayaan;</li> <li>q. perpustakaan; dan</li> <li>r. kearsipan.</li> </ul> <p>(5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelautan dan perikanan;</li> <li>b. pariwisata;</li> <li>c. pertanian;</li> <li>d. kehutanan;</li> <li>e. energi dan sumber daya mineral;</li> <li>f. perdagangan;</li> <li>g. perindustrian; dan</li> <li>h. transmigrasi.</li> </ul> <p>(6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas Daerah provinsi.</p> <p>(7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan</li> </ul>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		ketenteraman dan ketertiban umum; dan b. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.	
20.		Pasal 16	
		Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong praja Daerah provinsi.	Pengaturan khusus penyelenggaraan bidang ketenteraman dan ketertiban umum oleh Salpol PP Provinsi
21.		Pasal 17	
		<p>(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.</p> <p>(2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.</p> <p>(3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.</p> <p>(6) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima tambahan</p>	Pengaturan khusus unit pelayanan terpadu satu pintu Provinsi

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>Urusan Pemerintahan lainnya yang serumpun dengan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari 401(empat ratus satu).</p> <p>(7) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.</p>	
22.		Pasal 18	
		<p>(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.</p> <p>(2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau</li> <li>b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.</li> </ol> <p>(4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;</li> <li>b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;</li> <li>d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;</li> <li>e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;</li> </ol>	Menetapkan penggabungan urusan pemerintahan pada Dinas Daerah Provinsi



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan</p> <p>g. perpustakaan dan kearsipan.</p> <p>(5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.</p> <p>(6) Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.</p> <p>(7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.</p> <p>(8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.</p> <p>(9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.</p> <p>(10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah</p>		
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p>	
	<p>(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.</p>	<p>(1) Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional</p>	<p>Lembaga teknis daerah diubah menjadi unit</p>

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.</p> <p>(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol> <p>(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.</p> <p>(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.</p> <p>(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.</p> <p>(7) Pada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.</p>	<p>dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.</p> <p>(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan</li> <li>unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.</li> </ol> <p>(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.</p>	<p>pelaksana teknis dinas daerah</p>
24.		Pasal 20	
		<p>(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.</p> <p>(2) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.</p>	<p>Pengaturan khusus unit pelaksana teknis daerah provinsi di bidang pendidikan</p>

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
25.	Pasal 9	Pasal 21	
	<p>(1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.</p> <p>(2) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 3 (tiga) kelas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rumah sakit umum daerah kelas A;</li> <li>b. rumah sakit umum daerah kelas B; dan</li> <li>c. rumah sakit umum daerah kelas C.</li> </ol> <p>(3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan</li> <li>b. rumah sakit khusus daerah kelas B.</li> </ol> <p>(4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi secara tertulis dengan Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p>	<p>(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.</p> <p>(2) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi.</p> <p>(3) Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.</p> <p>(5) Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.</p> <p>(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.</p> <p>(7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan khusus unit pelaksana teknis daerah provinsi di bidang kesehatan</li> <li>b. Pengaturan terkait Rumah Sakit Daerah Provinsi</li> </ol>

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
26.		Pasal 22	
		<p>(1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.</p> <p>(2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.</p> <p>(3) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.</p> <p>(4) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <p>a. cabang dinas kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar; dan</p> <p>b. cabang dinas kelas B untuk mewisadahi beban kerja yang kecil.</p> <p>(5) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.</p> <p>(6) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan, cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(7) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.</p>	Pembentukan cabang Dinas di Kabupaten atau Kota
27.		Pasal 23	
		Pada Perangkat Daerah yang sudah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Perangkat Daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Paragraf 5 Badan Daerah Provinsi	
28.		Pasal 24	
		<p>(1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.</p> <p>(2) Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.</p> <p>(3) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.</p> <p>(4) Badan Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol> <p>(5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. keuangan;</li> <li>c. kepegawaian;</li> <li>d. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>e. penelitian dan pengembangan; dan</li> <li>f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Pengaturan terkait badan daerah provinsi

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>(6) Badan Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dibentuk dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah provinsi.</li> </ol> <p>(7) Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara.</p> <p>(8) Pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Perda provinsi.</p>	
29.		Pasal 25	
		Pembentukan badan Daerah provinsi dan pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.	
30.		Pasal 26	
		<p>(1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan Daerah provinsi tipe A untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;</li> <li>b. badan Daerah provinsi tipe B untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan</li> <li>c. badan Daerah provinsi tipe C untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.</li> </ol>	Menetapkan tipe badan Daerah Provinsi

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
31.		Pasal 27	
		<p>(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah provinsi sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.</p> <p>(2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria:</p> <p>a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau</p> <p>b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.</p> <p>(3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan</p> <p>b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.</p> <p>(4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.</p> <p>(5) Tipelogi badan Daerah provinsi hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.</p> <p>(6) Nomenklatur badan Daerah provinsi yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah provinsi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.</p>	Menetapkan penggabungan fungsi penunjang pemerintahan urusan
32.		Pasal 28	
		<p>(1) Pada badan Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.</p>	Menetapkan klasifikasi unit pelaksana teknis badan daerah provinsi

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan</li> <li>b. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.</li> </ul> <p>(4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.</p>	
	<p>BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>		
	<p>Bagian Pertama Sekretariat Daerah</p>	<p>Bagian Kedua Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	
		<p>Paragraf 1 Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota</p>	
33.	Pasal 10	Pasal 29	
	<p>(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.</p> <p>(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.</p> <p>(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;</li> <li>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;</li> </ul>	<p>(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan unsur staf.</p> <p>(2) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.</p> <p>(3) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;</p> <p>d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan</p> <p>e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.</p> <p>(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.</p>	<p>(4) Sekretariat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;</p> <p>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;</p> <p>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;</p> <p>d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>	
34.		Pasal 30	
		<p>(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;</p> <p>b. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan</p> <p>c. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.</p>	Menetapkan tipe Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota
	Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Paragraf 2 Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	
35.	Pasal 11	Pasal 31	
	<p>(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.</p> <p>(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi</p>	<p>(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;</li> <li>penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;</li> <li>penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan</li> <li>penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.</li> </ol> <p>(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.</p> <p>(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.</p>	<p>(2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.</p> <p>(4) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;</li> <li>penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;</li> <li>fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan</li> <li>penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.</li> </ol>	
36.		Pasal 32	
		<p>(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;</li> <li>sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B untuk memfasilitasi</li> </ol>	Menetapkan tipe Sekretariat DPRD Kabupaten atau Kota

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan</p> <p>c. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.</p>	
	<p>Bagian Ketiga Inspektorat</p>	<p>Paragraf 3 Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota</p>	
37.	Pasal 12	Pasal 33	
	<p>(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.</p> <p>(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan program pengawasan;</li> <li>b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan</li> <li>c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.</li> </ol> <p>(4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.</p> <p>(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.</p>	<p>(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.</p> <p>(3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;</li> <li>b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</li> <li>c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;</li> <li>d. penyusunan laporan hasil pengawasan;</li> <li>e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan</li> </ol>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.	
38.		Pasal 34	
		<p>(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;</p> <p>b. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan</p> <p>c. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.</p>	Menetapkan tipe Inspektorat Daerah Kabupaten atau Kota
	Bagian Keempat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
39.	Pasal 13		
	<p>(1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;</p> <p>b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;</p>		Tidak lagi mengatur mengenai BPDP dalam pasal tersendiri

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan</p> <p>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>(4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan.</p> <p>(5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.</p>		
	<p>Bagian Kelima Dinas Daerah</p>	<p>Paragraf 4 Dinas Daerah Kabupaten/Kota</p>	
40.	Pasal 14	Pasal 35	
	<p>(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.</p> <p>(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul> <p>(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.</p> <p>(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.</p> <p>(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.</p>	<p>(1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>(2) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.</p> <p>(4) Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
41.		Pasal 36	
		<p>(1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dinas Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;</li> <li>b. dinas Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan</li> <li>c. dinas Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.</li> </ul>	Menetapkan tipe Dinas Daerah Kabupaten atau Kota
42.		Pasal 37	
		<p>(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan</li> <li>b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.</li> </ul> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</li> <li>e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan</li> </ul>	<p>(1) Menetapkan secara rinci kategori urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan</p> <p>(2) Masing – masing urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk Dinas</p>

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>f. sosial.</p> <p>(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tenaga kerja;</li> <li>b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>c. pangan;</li> <li>d. pertanahan;</li> <li>e. lingkungan hidup;</li> <li>f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>i. perhubungan;</li> <li>j. komunikasi dan informatika;</li> <li>k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;</li> <li>l. penanaman modal;</li> <li>m. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>n. statistik;</li> <li>o. persandian;</li> <li>p. kebudayaan;</li> <li>q. perpustakaan; dan</li> <li>r. kearsipan.</li> </ul> <p>(5) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelautan dan perikanan;</li> <li>b. pariwisata;</li> <li>c. pertanian;</li> <li>d. perdagangan;</li> <li>e. kehutanan;</li> <li>f. energi dan sumber daya mineral;</li> <li>g. perindustrian; dan</li> <li>h. transmigrasi.</li> </ul>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>(6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas.</p> <p>(7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan</li> <li>b. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.</li> </ol>	
43.		Pasal 38	
		Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong praja Daerah kabupaten/kota.	Peraturan khusus penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban untuk Satpol PP Kabupaten atau Kota
44.		Pasal 39	
		<p>(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.</p> <p>(2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.</p> <p>(3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.</p> <p>(4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang</p>	Pengaturan khusus unit pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten atau Kota



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.</p> <p>(6) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.</p>	
45.		Pasal 40	
		<p>(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.</p> <p>(2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau</li> <li>b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.</li> </ol> <p>(4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;</li> <li>b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;</li> <li>d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral,</li> </ol>	<p>Penggabungan urusan pemerintahan pada Dinas daerah Kabupaten atau Kota</p>

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>transmigrasi, dan tenaga kerja;</p> <p>e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;</p> <p>f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan</p> <p>g. perpustakaan dan kearsipan.</p> <p>(5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.</p> <p>(6) Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.</p> <p>(7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.</p> <p>(8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.</p> <p>(9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.</p> <p>(10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.</p>	
	<p>Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah</p>		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
46.	Pasal 15	Pasal 41	
	<p>(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.</p> <p>(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.</p> <p>(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol> <p>(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.</p> <p>(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.</p> <p>(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.</p> <p>(7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.</p>	<p>(1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.</p> <p>(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan</li> <li>b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.</li> </ol> <p>(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.</p>	<p>Lembaga teknis daerah diubah menjadi unit pelaksana teknis dinas daerah</p>
47.		Pasal 42	
		<p>(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Pengaturan khusus unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan</p>

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		(2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.	
48.		Pasal 43	
		Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.	Pengaturan khusus unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan
49.	Pasal 16	Pasal 44	
	<p>(1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.</p> <p>(2) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 4 (empat) kelas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rumah sakit umum daerah kelas A;</li> <li>b. rumah sakit umum daerah kelas B;</li> <li>c. rumah sakit umum daerah kelas C; dan</li> <li>d. rumah sakit umum daerah kelas D.</li> </ol> <p>(3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan</li> <li>b. rumah sakit khusus daerah kelas B.</li> </ol> <p>(4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p>	<p>(1) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.</p> <p>(4) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.</p> <p>(6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.</p>	Pengaturan terkait Rumah Sakit Daerah kabupaten/kota

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.	
50.		Pasal 45	
		(1) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.	Pengaturan terkait Pusat Kesehatan Masyarakat
		Paragraf 5 Badan Daerah Kabupaten/Kota	
51.		Pasal 46	
		(1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (2) Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. (3) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (4) Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;	Pengaturan terkait badan daerah kabupaten/kota

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul> <p>(5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. keuangan;</li> <li>c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;</li> <li>d. penelitian dan pengembangan; dan</li> <li>e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(6) Badan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dibentuk dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah kabupaten/kota.</li> </ul> <p>(7) Pembentukan badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.</p>	
52.		Pasal 47	
		<p>(1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.</p> <p>(2) Tipe badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. badan Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;</li> </ul>	Menetapkan tipe badan Daerah kabupaten/kota

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. badan Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan</li> <li>c. badan Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.</li> </ul>	
53.		Pasal 48	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.</li> <li>(2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau</li> <li>b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.</li> </ul> </li> <li>(3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.</li> </ul> </li> <li>(4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.</li> <li>(5) Tipologi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.</li> <li>(6) Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum</li> </ul>	Menetapkan penggabungan fungsi penunjang pemerintahan urusan

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		penggabungan.	
54.		Pasal 49	
		<p>(1) Pada badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.</p> <p>(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan</p> <p>b. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.</p> <p>(4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.</p>	Menetapkan klasifikasi unit pelaksana teknis badan daerah kabupaten/kota
	Bagian Ketujuh Kecamatan	Paragraf 6 Kecamatan	
55.	Pasal 17	Pasal 50	
	<p>(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.</p> <p>(2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.</p>	<p>(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.</p> <p>(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</li> <li>c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;</li> <li>e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;</li> <li>f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan</li> <li>g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.</li> </ol> <p>(4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>(5) Kecamatan dipimpin oleh camat.</p> <p>(6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.</p> <p>(7) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p>	<p>kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;</li> <li>b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</li> <li>d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;</li> <li>e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;</li> <li>g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;</li> <li>h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan</li> <li>i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan.</p>	
56.		Pasal 51	
		<p>(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) tipe.</p> <p>(2) Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang besar; dan</li> </ol>	Menetapkan tipe Kecamatan

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		b. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang kecil.	
	Bagian Kedelapan Kelurahan		
57.	Pasal 18	Pasal 52	
	<p>(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.</p> <p>(2) Kelurahan dipimpin oleh lurah.</p> <p>(3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.</p> <p>(4) Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.</p> <p>(2) Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.</p> <p>(3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.</p> <p>(4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;</li> <li>b. melakukan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. melaksanakan pelayanan masyarakat;</li> <li>d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;</li> <li>e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;</li> <li>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan</li> <li>g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Menetapkan tugas Lurah secara rinci
	BAB V BESARAN ORGANISASI DAN PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH	BAB IV KRITERIA PERANGKAT DAERAH	
	Bagian Pertama Variabel Besaran Organisasi		
58.	Pasal 19	Pasal 53	
	(1) Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel:	(1) Tipologi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta	Menetapkan tipologi

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>a. jumlah penduduk;</p> <p>b. luas wilayah; dan</p> <p>c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>(2) Perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p>	<p>fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:</p> <p>a. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);</p> <p>b. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus ); dan</p> <p>c. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).</p> <p>(2) Tipologi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:</p> <p>a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);</p> <p>b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).</p> <p>(3) Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.</p> <p>(4) Tipologi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:</p> <p>a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan</p> <p>b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).</p>	<p>berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel</p>

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>(5) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) untuk Urusan Pemerintahan selain yang dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan</li> <li>b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).</li> </ol>	
59.		Pasal 54	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.</li> <li>(2) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang.</li> <li>(3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun.</li> <li>(4) Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.</li> </ol>	Penurunan tipe dan penggabungan Perangkat Daerah
	Bagian Kedua Jumlah Besaran Organisasi		
	Paragraf 1 Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
60.	Pasal 20		
	<p>(1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;</li> <li>b. sekretariat DPRD;</li> <li>c. dinas paling banyak 12 (dua belas); dan</li> <li>d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan).</li> </ol> <p>(2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;</li> <li>b. sekretariat DPRD;</li> <li>c. dinas paling banyak 15 (lima belas); dan</li> <li>e. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh).</li> </ol> <p>(3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;</li> <li>b. sekretariat DPRD;</li> <li>c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan</li> <li>d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas).</li> </ol>		
	<p>Paragraf 2</p> <p>Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>		
61.	Pasal 21		
	<p>(1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;</li> <li>b. sekretariat DPRD;</li> <li>c. dinas paling banyak 12 (dua belas);</li> <li>d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan);</li> <li>e. kecamatan; dan</li> <li>f. kelurahan.</li> </ol>		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>(2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;</li> <li>b. sekretariat DPRD;</li> <li>c. dinas paling banyak 15 (lima belas);</li> <li>d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh);</li> <li>e. kecamatan; dan</li> <li>kelurahan.</li> </ol> <p>(3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;</li> <li>b. sekretariat DPRD;</li> <li>c. dinas paling banyak 18 (delapan belas);</li> <li>d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);</li> <li>e. kecamatan; dan</li> <li>f. kelurahan.</li> </ol>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Perumpunan Urusan Pemerintahan</p>		
62.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p>		
	<p>(1) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani.</p> <p>(2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.</p> <p>(3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.</p> <p>(4) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;</li> <li>b. bidang kesehatan;</li> </ol>		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;</li> <li>d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;</li> <li>e. bidang kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>f. bidang kebudayaan dan pariwisata;</li> <li>g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;</li> <li>h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industry dan perdagangan;</li> <li>i. bidang pelayanan pertanahan;</li> <li>j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;</li> <li>k. bidang pertambangan dan energi; dan</li> <li>l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.</li> </ul> <p>(5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;</li> <li>b. bidang penelitian dan pengembangan;</li> <li>c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;</li> <li>d. bidang lingkungan hidup;</li> <li>e. bidang ketahanan pangan;</li> <li>f. bidang penanaman modal;</li> <li>g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;</li> <li>h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;</li> <li>i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;</li> <li>j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</li> <li>k. bidang pengawasan; dan</li> </ul> <p>(6) bidang pelayanan kesehatan.</p> <p>(7) Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.</p>		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
63.	Pasal 23		
	Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.		
	BAB VI SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BAB V SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
	Bagian Pertama Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	Bagian Kesatu Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	Pengaturan Organisasi berdasarkan masing-masing tipe Perangkat Daerah Provinsi
	Paragraf 1 Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi	
64.	Pasal 24	Pasal 55	
	(1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro, dan masing-masing biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.  (2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.	(1) Sekretariat Daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro. (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.	
65.		Pasal 56	
		(1) Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
66.		Pasal 57	
		(1) Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.	
67.		Pasal 58	
		Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah provinsi dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen.	
		Paragraf 2 Sekretariat DPRD Provinsi	
68.		Pasal 59	
		(1) Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (3) Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (5) Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	Paragraf 3 Lembaga Teknis Daerah	Paragraf 3 Inspektorat Daerah Provinsi	
69.	Pasal 26	Pasal 60	
	<p>(1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(3) Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.</p> <p>(4) Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(5) Unit pelaksana teknis badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.</p>	<p>(1) Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(3) Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.</p> <p>(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p> <p>(5) Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.</p> <p>(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p>	
70.		Pasal 61	
		Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.	
	Paragraf 2 Dinas Daerah	Paragraf 4 Dinas Daerah Provinsi	
71.	Pasal 25	Pasal 62	
	<p>(1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(3) (3) Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.</p>	<p>(1) Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
72.		Pasal 63	
		<p>(1) Dinas Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p> <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.</p>	
73.		Pasal 64	
		<p>(1) Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p> <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.</p>	
74.		Pasal 65	
		<p>(1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.</p>	
75.		Pasal 66	
		<p>(1) Cabang dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi.</p> <p>(2) Cabang dinas kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Paragraf 5 Badan Daerah Provinsi	
76.		Pasal 67	
		(1) Badan Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.	
77.		Pasal 68	
		(1) Badan Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.	
78.		Pasal 69	
		(1) Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.	
79.		Pasal 70	
		Badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.	
80.		Pasal 71	
		(1) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A, pada badan	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional. (2) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.	
81.		Pasal 72	
		Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.	
82.		Pasal 73	
		(1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A. (2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak berlaku.	
	Paragraf 3 Lembaga Teknis Daerah		
83.	Pasal 27		
	(1) Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua)		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>seksi.</p> <p>(2) Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(3) Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.</p> <p>(4) Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.</p> <p>(5) Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.</p> <p>(6) Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Pengaturan Organisasi berdasarkan masing-masing tipe Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota</p>	
84.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p>	
	<p>(1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian.</p>	<p>(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.</p> <p>(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.</p> <p>(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
85.		Pasal 75	
		<p>(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.</p> <p>(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.</p> <p>(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p>	
86.		Pasal 76	
		<p>(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten.</p> <p>(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.</p> <p>(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p>	
87.		Pasal 77	
		Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen tertentu.	
		Paragraf 2 Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	
88.		Pasal 78	
		<p>(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.</p> <p>(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(3) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.</p> <p>(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.</p>	
	<p>Paragraf 3 Lembaga Teknis Daerah</p>	<p>Paragraf 3 Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota</p>	
89.	<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 79</p>	
	<p>(1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(3) Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.</p> <p>(4) Unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.</p>	<p>(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(3) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.</p> <p>(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p> <p>(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.</p> <p>(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p>	
90.		<p>Pasal 80</p>	
		<p>Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	
	<p>Paragraf 2 Dinas Daerah</p>	<p>Paragraf 4 Dinas Daerah Kabupaten/Kota</p>	
91.	<p>Pasal 29</p>	<p>Pasal 81</p>	
	<p>(1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)</p>	<p>(1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.</p>	<p>paling banyak 4 (empat) bidang.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.</p>	
92.		Pasal 82	
		<p>(1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p> <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.</p>	
93.		Pasal 83	
		<p>(1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p> <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.</p>	
94.		Pasal 84	
		<p>(1) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Paragraf 5 Badan Daerah Kabupaten/Kota	
95.		Pasal 85	
		(1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.	
96.		Pasal 86	
		(1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.	
97.		Pasal 87	
		(1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.	
98.		Pasal 88	
		(1) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. (2) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
99.		Pasal 89	
		Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.	
100.		Pasal 90	
		<p>(1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.</p> <p>(2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku.</p>	
101.	Pasal 31		
	<p>(1) Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri dari 2 (dua) seksi.</p> <p>(2) Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(3) Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.</p>		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>(4) Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.</p> <p>(5) Rumah sakit umum daerah kelas D terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.</p> <p>(6) Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.</p> <p>(8) Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.</p>		
	Paragraf 4 Kecamatan dan Kelurahan	Paragraf 6 Kecamatan	
102.	Pasal 32	Pasal 91	
	<p>(1) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian.</p> <p>(2) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.</p>	<p>(1) Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p>	
103.	Pasal 33	Pasal 92	
	Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang.	<p>(1) Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.</p> <p>(3) Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
104.		Pasal 93	
		<p>(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.</p> <p>(2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon Iia atau jabatan pimpinan tinggi pratama.</p> <p>(3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.</p>	
	BAB VII ESELON PERANGKAT DAERAH	BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH	
	Bagian Pertama Eselon Jabatan Perangkat Daerah Provinsi	Bagian Kesatu Jabatan Perangkat Daerah Provinsi	
105.	Pasal 34	Pasal 94	
	<p>(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan structural eselon Ib.</p> <p>(2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum daerah kelas A, merupakan jabatan struktural eselon Iia.</p> <p>(3) Kepala biro, direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum kelas A, dan direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon Iib.</p> <p>(4) Kepala kantor, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, kepala bidang dan inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.</p> <p>(5) Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit daerah merupakan jabatan structural eselon IIIb.</p> <p>(6) Kepala seksi, kepala subbagian, dan kepala subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa.</p>	<p>(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.</p> <p>(2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon Iia atau jabatan pimpinan tinggi pratama.</p> <p>(3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.</p> <p>(4) Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.</p> <p>(5) Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.</p> <p>(6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. (7) Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.	
	Bagian Kedua Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Kedua Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
106.	Pasal 35	Pasal 95	
	(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa. (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb. (3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.	(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/ kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>(6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.</p> <p>(7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.</p>	<p>jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.</p> <p>(6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.</p> <p>(7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.</p> <p>(9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.</p>	
107.		Pasal 96	
		<p>(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.</p> <p>(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>	Menetapkan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
108.		Pasal 97	
		<p>(1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.</p> <p>(2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Bagian Ketiga Pengisian Jabatan Perangkat Daerah	
109.		Pasal 98	
		<p>(1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teknis;</li> <li>b. manajerial; dan</li> <li>c. sosial kultural.</li> </ol> <p>(3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.</p> <p>(4) (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.</p> <p>(5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.</p> <p>(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.</p> <p>(7) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.</p> <p>(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi.</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		(10)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.	
110.		Pasal 99	
		Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
111.		Pasal 100	
		(1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit. (2) Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		BAB VII PERANGKAT DAERAH BARU	
112.		Pasal 101	
		(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah provinsi baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan mengenai pembentukan, jenis, kriteria, tipologi, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan Perangkat Daerah pada Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Perangkat Daerah provinsi baru dan kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlaksana, Daerah induk wajib melakukan penataan ulang Perangkat Daerah dengan menghitung kembali intensitas Urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.</p>	
	BAB VIII STAF AHLI	BAB VIII STAF AHLI	
113.	Pasal 36	Pasal 102	
	<p>(1) Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.</p> <p>(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli.</p> <p>(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri sipil.</p> <p>(4) Tugas dan fungsi staf ahli gubernur, bupati/walikota ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.</p>	<p>(1) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.</p> <p>(2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.</p> <p>(4) Staf ahli gubernur dan bupati/wali kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli gubernur oleh gubernur dan staf ahli bupati/wali kota oleh bupati/wali kota.</p>	
114.	Pasal 37	Pasal 103	
	<p>(1) Staf ahli gubernur merupakan jabatan struktural eselon IIa, dan staf ahli bupati/walikota merupakan jabatan struktural eselon IIb.</p> <p>(2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.</p>	<p>(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya.</p> <p>(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/wali kota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.</p>	
		BAB IX PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN NOMENKLATUR	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Bagian Kesatu Tujuan Pemetaan	
115.		Pasal 104	
		(1) Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.  (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah.	
		Bagian Kedua Tata Cara Pemetaan	
116.		Pasal 105	
		(1) Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.  (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsinya.  (3) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah provinsi.  (4) Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.  (5) Menteri menyampaikan rencana pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.  (6) Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
117.		Pasal 106	
		<p>(1) Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Menteri mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah untuk pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.</p>	
		Bagian Ketiga Hasil Pemetaan	
118.		Pasal 107	
		<p>(1) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.</p> <p>(2) Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);</li> <li>b. provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);</li> <li>c. provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);</li> <li>d. provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);</li> <li>e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);</li> <li>f. kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan</li> <li>g. kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).</li> </ol>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>(3) Dalam hal suatu Daerah masuk dalam 2 (dua) klasifikasi atau lebih, Daerah dimaksud dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.</p> <p>(4) Perkalian hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi sekretariat DPRD, Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang kearsipan dan persandian, Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota bidang kehutanan, serta bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>(5) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.</p>	
119.		Pasal 108	
		<p>(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menggunakan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>(2) Penggunaan hasil pemetaan untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menggunakan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) untuk pembinaan teknis kepada Daerah secara nasional.</p>	
		Bagian Keempat Nomenklatur Perangkat Daerah	
120.		Pasal 109	
		<p>(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>(2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p>(3) Menteri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit kerja dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.</p>	
	BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI	BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH	
121.	Pasal 38	Pasal 110	
	<p>(1) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.</p>	<p>(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>	
122.	Pasal 39	Pasal 111	
	<p>(1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.</p> <p>(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kepada Menteri bagi organisasi perangkat daerah provinsi.</p>	<p>(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi;</li> <li>b. budaya organisasi; dan</li> <li>c. inovasi organisasi.</li> </ol>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
123.	Pasal 40	Pasal 112	
	<p>(1) Fasilitas yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan peraturan daerah.</p> <p>(2) (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan fasilitas, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.</p>	<p>(1) Menteri melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah provinsi dan gubernur melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang memiliki inovasi dalam penataan dan pengelolaan organisasi.</p> <p>(2) Penghargaan terhadap hasil penilaian kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri pada Hari Otonomi Daerah.</p>	
124.	Pasal 41	Pasal 113	
	<p>(1) Peraturan daerah provinsi tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.</p> <p>(2) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri.</p> <p>(3) Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan kelembagaan Perangkat Daerah.</p>	
125.	Pasal 42	Pasal 114	
	<p>(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah.</p> <p>(2) (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p>	<p>(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.</p>	
126.		Pasal 115	
		<p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		(2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.	
		BAB XI HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
127.		Pasal 116	
		<p>(1) Perangkat Daerah provinsi melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi.</p> <p>(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sinkronisasi data;</li> <li>b. sinkronisasi sasaran dan program; dan</li> <li>c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.</li> </ol>	
	BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN	
128.	Pasal 43	Pasal 117	
	Provinsi, kabupaten/kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai DPRD, pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan penjabat kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.	<p>(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.</p> <p>(2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.	
129.	Pasal 44	Pasal 118	
	Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, pembentukan perangkat daerah untuk melaksanakan status istimewa dan otonomi khusus berpedoman pada peraturan Menteri dengan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.	(1) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus. (2) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.	
130.	Pasal 45	Pasal 119	
	(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. (2) (2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.	(1) Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada dinas. (2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional berada di bawah dinas dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. (3) Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran dinas. (4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.	
131.	Pasal 46	Pasal 120	
	Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.</p> <p>(2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>	
132.	Pasal 47		
	<p>(1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu.</p> <p>(2) Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.</p> <p>(3) Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah.</p> <p>(4) Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p>		
	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	
133.	Pasal 48	Pasal 121	
	Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten/kota yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada kabupaten/kota.	Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.	
134.	Pasal 49	Pasal 122	
	Di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangundangan.	(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p> <p>(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p>	
135.	Pasal 50	Pasal 123	
	<p>(1) Perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.</p> <p>(2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan.</p>	Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	
136.	Pasal 51		
	Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.		
	BAB XII KETENTUAN PENUTUP	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	
137.	Pasal 52	Pasal 124	
	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<p>(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</p> <p>(3) Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada.</p> <p>(4) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.</p> <p>(5) Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
138.	Pasal 53	Pasal 125	
	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
139.		Pasal 126	
		Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
140.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
141.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO	
142.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY	
143.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 89	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 114	

**PENJELASAN**

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	
	I. UMUM	I. UMUM	
	<p>Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.</p> <p>Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.</p> <p>Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.</p> <p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi</p>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.</p> <p>Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).</p> <p>Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.</p> <p>Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.</p> <p>Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.</p> <p>Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.</p> <p>Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.</p> <p>Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat Provinsi,</p>	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.</p> <p>Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.</p> <p>Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.</p> <p>Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.</p> <p>Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>Inspektorat Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.</p> <p>Selain itu, eselon kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten/kota diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>Beberapa perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri.</p> <p>Pembinaan dan pengendalian organisasi dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Dalam ketentuan ini pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang perangkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pembentukan</p>	<p>substansi urusan pemerintahannya.</p> <p>Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.</p> <p>Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).</p> <p>Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.</p> <p>Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah, seperti sekretariat badan narkoba provinsi, kabupaten dan kota, sekretariat komisi penyiaran, serta lembaga lain untuk mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun untuk pengendaliannya, pembentukannya harus dengan persetujuan pemerintah atas usul kepala daerah.</p> <p>Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.</p> <p>Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.</p>	<p>Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.</p>	
	II. PASAL DEMI PASAL	II. PASAL DEMI PASAL	
	Pasal 1 Cukup jelas.	Pasal 1 Cukup jelas.	
		<p>Pasal 2</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	Pasal 2 Cukup jelas.	Pasal 3 Cukup jelas.	
		Pasal 4 Cukup jelas.	
		Pasal 5 Cukup jelas.	
		Pasal 6 Cukup jelas.	
	Pasal 3 Cukup jelas.	Pasal 7 Cukup jelas.	
		Pasal 8 Cukup jelas.	
	Pasal 4 Cukup jelas.	Pasal 9 Cukup jelas.	
		Pasal 10 Cukup jelas.	
	Pasal 5 Cukup jelas.	Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan” adalah membina dan mengawasi seluruh Perangkat Daerah. Ayat (5) Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Pasal 12 Cukup jelas.	
	Pasal 6 Cukup jelas.		
	Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.	Pasal 13 Cukup jelas.	
		Pasal 14 Cukup jelas.	
		Pasal 15 Cukup jelas.	
		Pasal 16 Cukup jelas.	
		Pasal 17 Ayat (1)	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 18</p> <p>Ayat (1) Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Yang dimaksud dengan “tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi tipe A dengan 5 (lima) bidang.</p> <p>Ayat (7) Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada dinas dimaksud.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (9) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (10) Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 8</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Pemberian dukungan termasuk penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.</p>	<p>induknya.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas.</p>	
		<p>Pasal 20 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 9 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 22</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.</p> <p>Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (8) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh cabang dinas.</p>	
		<p>Pasal 23 Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 24</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi” adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.	
		Pasal 25 Cukup jelas.	
		Pasal 26 Cukup jelas.	
		Pasal 27 Ayat (1) Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila beban kerja sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Dalam hal fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan digabung dengan 2 (dua) fungsi, maka tipologi	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>badan ditentukan berdasarkan jumlah bidang dari perhitungan nilai variabel fungsi penunjang tersebut. Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 2 (dua) bidang, tipeloginya adalah tipe C. Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 3 (tiga) bidang, tipeloginya adalah tipe B, dan apabila jumlah bidang setelah penggabungan 4 (empat) bidang atau lebih, tipeloginya adalah tipe A.</p> <p>Yang dimaksud dengan “jumlah bidang setelah hasil penggabungan” adalah jumlah bidang pada badan yang berdiri sendiri ditambah dengan bidang atau seksi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang tidak bisa berdiri sendiri.</p> <p>Ayat (6)</p> <p>Dengan ketentuan ini, nomenklatur badan yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur badan utama, sedangkan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada badan dimaksud.</p>	
		<p>Pasal 28</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.</p> <p>Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	Pasal 10 Cukup jelas.	Pasal 29 Cukup jelas.	
		Pasal 30 Cukup jelas.	
	Pasal 11 Cukup jelas.	Pasal 31 Cukup jelas.	
		Pasal 32 Cukup jelas.	
	Pasal 12 Cukup jelas.	Pasal 33 Cukup jelas.	
		Pasal 34 Cukup jelas.	
	Pasal 13 Cukup jelas.		
	Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah	Pasal 35 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.		
		Pasal 36 Cukup jelas.	
		Pasal 37 Cukup jelas.	
		Pasal 38 Cukup jelas	
		Pasal 39 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.	
		Pasal 40 Ayat (1) Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Yang dimaksud dengan “tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi dinas tipe A dengan 5 (lima) bidang.</p> <p>Ayat (7) Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada dinas dimaksud.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (9) Cukup jelas.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Ayat (10) Cukup jelas.	
	<p>Pasal 15</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.</p>	<p>Pasal 41</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas.</p>	
		Pasal 42 Cukup jelas.	
		Pasal 43 Yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.	
	Pasal 16 Cukup jelas.	Pasal 44 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Pasal 45 Cukup jelas.	
		Pasal 46 Cukup jelas.	
		Pasal 47 Cukup jelas.	
		<p>Pasal 48</p> <p>Ayat (1) Masing-masing fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan “tipologi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan” adalah sesuai dengan jumlah bidang setelah penggabungan.</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>Apabila 3 (tiga) bidang menjadi tipe B dan apabila jumlah bidang lebih dari 3 (tiga) menjadi tipe A.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 49</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 17 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 50 Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 51 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 18</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 52 Cukup jelas</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.</p>		
	<p>Pasal 19 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 53 Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 54 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 20 Ayat (1) Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.</p>		
	<p>Pasal 21 Ayat (1) Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.</p>		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>Pasal 22</p> <p>Ayat (1)            Urusan pemerintahan yang perlu ditangani terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.</p> <p>Ayat (2)            Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun sebaliknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.</p> <p>Ayat (3)            Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)            Perumpunan dimaksud adalah penanganan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat digabung dalam satu perangkat daerah berbentuk dinas, misalnya urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah digabung dengan urusan perindustrian dan perdagangan.</p> <p>Huruf a            Cukup jelas.</p> <p>Huruf b            Cukup jelas.</p> <p>Huruf c            Cukup jelas.</p> <p>Huruf d            Cukup jelas.</p> <p>Huruf e            Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p>		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Pelaksanaan urusan bidang pelayanan pertanahan diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.</p> <p>Huruf j Cukup jelas.</p> <p>Huruf k Cukup jelas.</p> <p>Huruf l Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Perumpunan dimaksud adalah penanganan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan fungsi pendukung yang dapat digabung dalam satu perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor, misalnya urusan perencanaan pembangunan digabung dengan urusan penelitian dan pengembangan.</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>		

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.</p> <p>Huruf j Cukup jelas.</p> <p>Huruf k Cukup jelas.</p> <p>Huruf l Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>		
	<p>Pasal 23</p> <p>Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi staf seperti bidang hukum, organisasi, hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan administratif, serta fungsi pemerintahan umum lainnya antara lain bidang penanganan perbatasan dan administrasi kerja sama luar negeri, yang termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan, dan tidak termasuk fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah diwadahi dalam sekretariat daerah.</p>		
	<p>Pasal 24</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 55</p> <p>Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 56</p> <p>Cukup jelas.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Pasal 57 Cukup jelas.	
		Pasal 58 Cukup jelas.	
		Pasal 59 Cukup jelas.	
	Pasal 26 Cukup jelas.	Pasal 60 Cukup jelas.	
		Pasal 61 Cukup jelas.	
	Pasal 25 Cukup jelas.	Pasal 62 Cukup jelas.	
		Pasal 63 Cukup jelas.	
		Pasal 64 Cukup jelas.	
		Pasal 65 Cukup jelas.	
		Pasal 66 Cukup jelas.	
		Pasal 67 Cukup jelas.	
		Pasal 68 Cukup jelas.	
		Pasal 69 Cukup jelas.	
		Pasal 70 Cukup jelas.	
		Pasal 71 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Pasal 72 Cukup jelas.	
		Pasal 73 Cukup jelas.	
	Pasal 27 Cukup jelas.		
	Pasal 28 Cukup jelas.	Pasal 74 Cukup jelas.	
		Pasal 75 Cukup jelas.	
		Pasal 76 Cukup jelas.	
		Pasal 77 Cukup jelas.	
		Pasal 78 Cukup jelas.	
	Pasal 30 Cukup jelas.	Pasal 79 Cukup jelas.	
		Pasal 80 Cukup jelas.	
	Pasal 29 Cukup jelas.	Pasal 81 Cukup jelas.	
		Pasal 82 Cukup jelas.	
		Pasal 83 Cukup jelas.	
		Pasal 84 Cukup jelas.	
		Pasal 85 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Pasal 86 Cukup jelas.	
		Pasal 87 Cukup jelas.	
		Pasal 88 Cukup jelas.	
		Pasal 89 Cukup jelas.	
		Pasal 90 Cukup jelas.	
	Pasal 31 Cukup jelas.		
	Pasal 32 Cukup jelas.	Pasal 91 Cukup jelas.	
	Pasal 33 Untuk menentukan jumlah susunan organisasi masing-masing perangkat daerah dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	Pasal 92 Cukup jelas.	
		Pasal 93 Cukup jelas.	
	Pasal 34 Cukup jelas.	Pasal 94 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas</p> <p>Ayat (9) Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.</p>	
	<p>Pasal 35 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 95</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (8) Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Ayat (9) Cukup jelas.	
		Pasal 96 Cukup jelas.	
		Pasal 97 Cukup jelas.	
		Pasal 98 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas.	
		Pasal 99 Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.	
		Pasal 100 Cukup jelas.	
		Pasal 101 Cukup jelas.	
	Pasal 36 Cukup jelas.	Pasal 102 Cukup jelas.	
	Pasal 37 Cukup jelas.	Pasal 103 Cukup jelas.	
		Pasal 104 Cukup jelas.	
		Pasal 105 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan ”Menteri menyampaikan rencana pemetaan kepada kementerian/lembaga pemerintah	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan” adalah Menteri memfasilitasi dan mengoordinasikan pertemuan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan verifikasi data dari kabupaten/kota masing-masing dengan menggunakan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 106 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah” adalah sistem informasi yang digunakan secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan pemetaan Urusan Pemerintahan dengan kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah, yang antara lain meliputi peta Urusan Pemerintahan, indikator, bobot, interval, tata cara perhitungan skor intensitas urusan dan besaran kelembagaan Perangkat Daerah, peta jabatan, jumlah pemangku jabatan dan persyaratan kompetensi yang diperlukan, serta data lain yang diperlukan dalam pembinaan dan pengendalian kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 107 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		<p>Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan” adalah kabupaten/kota yang berlokasi di pulau-pulau terluar wilayah laut perbatasan negara. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 108 Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 109 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 38 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 110 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 39 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas</p>	<p>Pasal 111 Ayat (1) Cukup jelas.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>sektor maupun antarstrata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”fasilitasi” adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (2) Huruf a Pembinaan struktur organisasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian struktur dengan beban kerja organisasi.</p> <p>Huruf b Pembinaan budaya organisasi dilaksanakan untuk meningkatkan etos dan kinerja organisasi.</p> <p>Huruf c Pembinaan inovasi organisasi dilaksanakan untuk mendorong organisasi menyediakan seluruh sumber daya dan sistem kerja yang efektif dan efisien. Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 40 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 112 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 41 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 113 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 42 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 114 Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 115 Ayat (1) Materi muatan Peraturan Menteri memerhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan yang ada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.</p>	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		Ayat (2) Cukup jelas.	
		Pasal 116 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif dan fungsional” adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama. Ayat (4) Cukup jelas.	
	Pasal 43 Cukup jelas.	Pasal 117 Cukup jelas.	
	Pasal 44 Pembentukan perangkat daerah bagi daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa dan daerah otonomi khusus secara umum berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, sedangkan untuk perangkat daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kedudukannya sebagai daerah istimewa dan otonomi khusus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari segi jumlah dan jenis perangkat daerah dengan berpedoman pada peraturan Menteri.	Pasal 118 Cukup jelas.	
	Pasal 45 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan” adalah tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan selain tugas dan fungsi perangkat daerah tetapi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangundangan, misalnya	Pasal 119 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>sekretariat komisi penyiaran, secretariat badan narkoba. Yang dimaksud dengan “tugas pemerintahan umum lainnya” adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah, misalnya penanganan perbatasan, kerja sama antar daerah.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>		
	<p>Pasal 46 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 120 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai” adalah infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 47 Cukup jelas.</p>		
	<p>Pasal 48 Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas/badan pada perangkat daerah kabupaten/kota tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.</p>	<p>Pasal 121 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 49 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 122 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 50 Ayat (1) Perangkat daerah yang dapat didukung oleh jabatan fungsional seperti jabatan fungsional auditor pada</p>	<p>Pasal 123 Cukup jelas.</p>	



No.	PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
	<p>inspektorat, jabatan fungsional perencana pada badan perencanaan pembangunan daerah, jabatan fungsional pustakawan pada badan/kantor perpustakaan, jabatan fungsional arsiparis pada badan/kantor arsip, jabatan fungsional pranata komputer dan lain-lain, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana.</p> <p>Ayat (2) Pelaksanaan penyerasian dan rasionalisasi dimaksud dalam hal ini adalah bahwa pembina jabatan fungsional dapat menetapkan program impassing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p>Pasal 51 Cukup jelas.</p>		
	<p>Pasal 52 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 124 Cukup jelas.</p>	
	<p>Pasal 53 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 125 Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 126 Cukup jelas.</p>	
	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4741</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5887</p>	